

Adat-istiadat dalam Perspektif Kristiani

Lalu bagaimana hubungan antara kebudayaan dan adat-istiadat? Biasa disebut secara singkat dengan istilah “adat” saja, ia sebenarnya hanyalah kebiasaan-kebiasaan belaka.⁸ Dilihat dari perandan fungsinya, adat merupakan “sesuatu” yang digunakan oleh masyarakat dalam rangka memelihara keutuhan dan keharmonisan hubungan di antara sesama anggotanya. Karena adatlah maka setiap orang memiliki kejelasan dalam hal peran, fungsi, hak dan kewajibannya di dalam lingkungan sosial di mana ia berada. Ketika bersama keluarganya yang berasal dari suku Batak, si Bonar bersikap begini dan begitu, tapi dalam lingkungan keluarga isterinya yang berasal dari suku Jawa, ia pun bersikap lain lagi. Ketika saudara laki-laki dari pihak ibunya menikah, ia sibuk bantu-bantu. Tapi, begitu adiknya yang perempuan menikah, ia justru tenang-tenang saja. Apakah yang mengatur dan menetapkan apa dan bagaimana seharusnya sikap dan tindakan si Bonar itu kalau bukan adat? Bukankah dengan adanya adat itulah maka saling hubungan di antara anggota masyarakat menjadi harmonis dan teratur?

Adat, sebagaimana halnya kebudayaan, memang merupakan kebiasaan belaka yang asal-usul dan berlakunya harus dilihat dalam konteks lingkungan sosial setiap masyarakat yang memilikinya. Dalam Alkitab disebutkan bahwa seorang perempuan harus berpakaian dengan cara-cara tertentu. Adat belakakah itu atau sebuah doktrin yang penerapannya memang mutlak harus begitu? Sebelum makan, “Yesus berdoa dan memecah-mecahkan roti”, demikian kata Alkitab. Kalau memang harus begitu penerapannya, apakah yang harus dipecah-pecahkan padahal makanan kita adalah nasi? Banyak contoh lain yang bisa diambil dari Alkitab, namun yang penting, kita harus bijaksana membedakan mana ajaran dan mana kebiasaan.

Pelayanan kristiani, apa pun tujuan dan bagaimana pun bentuknya, jelas sangat penting dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Seorang pelayan Kristen yang ingin menjadi berkat di dalam dan melalui pelayanannya, jelas perlu memahami bagaimana nilai-nilai, kebiasaan, tata-cara menjalani kehidupan, atau pola-pola interaksi masyarakat setempat -- terutama masyarakat di mana ia melayani.

Sekedar untuk direnungkan, mengapa Yesus harus menunggu bertahun-tahun (sampai usia 30) untuk dapat melayani? Mengapa tidak sejak kecil atau remaja saja Ia berkeliling untuk mengajar atau mengadakan mukjizat ke sana-sini? Bagi saya jawabannya bukan sekedar menunggu waktu yang tepat, bukan pula karena Ia tidak mampu (tiada

yang mustahil bagi-Nya bukan?), melainkan karena Yesus sendiri harus belajar banyak sebelum memenuhi tugas pelayanan-Nya. Ia harus belajar memperhatikan, memahami, dan menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan pola-pola hubungan sosial masyarakat yang akan dilayani-Nya kelak. Dengan bahasa apakah, misalnya, Yesus harus mengajar jika Ia sendiri tak bisa bicara dalam bahasa yang dimengerti masyarakat? Bagaimanakah Ia mampu menegur, mengajukan pertanyaan, atau membuat perumpamaan-perumpamaan dengan tepat jika Ia sendiri tak mengerti nilai-nilai, norma-norma, hukum atau adat-istiadat masyarakat? Bagaimanakah Ia mampu menarik murid-murid dan para pengikut lainnya serta membina hubungan yang erat dengan banyak orang jika Ia sendiri tidak hidup dengan pola-pola hubungan sosial yang sama dengan mereka? Bagaimanakah Ia dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat jika Ia sendiri tidak paham kebutuhan mereka yang sesungguhnya? Pertanyaan-pertanyaan lain yang sejenis itu bisa saja diajukan, namun jawabannya tetap sama: karena Yesus harus belajar dan mempersiapkan diri selama waktu tertentu sebelum memenuhi tugas pelayananNya.

Sama seperti Yesus, kita pun harus mempersiapkan diri dan belajar terus-menerus agar dapat memahami siapa dan bagaimana orang-orang yang akan kita layani. Kita diutus ke dalam dunia yang majemuk dan heterogen masyarakatnya. Bagaimana agar kita dapat memengaruhi mereka? Tentu saja yang pertama adalah berupaya sedemikian agar kita dapat diterima oleh mereka, dalam arti menimbulkan simpati mereka. Lalu, bagaimana agar kita dapat diterima oleh mereka? Jawabannya, berupalah memahami kebudayaan (bahasa, cara-cara berkomunikasi, pola-pola hubungan sosial, dan lainnya) dan adat-tradisi mereka. Sebagai contoh, mengapa pada akhirnya Nommensen, seorang penginjil Jerman, mampu mengkristenkan suku Batak yang masih primitif pada pertengahan abad ke-19 itu, sementara para penginjil asing lainnya mati dibunuh?⁹ Nommensen, yang di masa kecilnya telah banyak mengalami penderitaan dan sakit-penyakit, tentulah sadar akan “bahaya-bahaya” yang akan dihadapinya dalam menjawab panggilan ilahi untuk memberitakan Injil ke Tanah Batak. Setidaknya tentu banyak perbedaan yang akan dihadapinya di sana; baik peradaban, kepercayaan, bahasa, budaya, dan tingkat pendidikan. Khususnya dalam hal adat dan Injil, Nommensen mencoba memahami keduanya. Ia membagi adat Batak tersebut ke dalam tiga kategori: 1) Adat yang netral; 2) Adat yang bertentangan dengan Injil; 3) Adat yang sesuai dengan Injil.¹⁰

Pertentangan dalam hal seperti itu pernah juga dialami antara orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan Tuhan Yesus (Matius 15: 1-20). Orang Farisi dan

Ahli Taurat menuduh Yesus melanggar adat-istiadat Yahudi, sementara Yesus menegur orang-orang Farisi melanggar perintah Allah demi adat-istiadat nenek-moyang mereka. Dengan tiga kategori ini, Nommensen lebih mudah memahaminya dan menempatkan dirinya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat Batak; kapan dia berbicara tentang Injil, kapan tentang adat, dan kapan kedua-duanya.

Sebelum ke Tanah Batak, pelajaran pertama Nommensen dalam hal bersosialisasi dengan orang Batak dan Melayu dilakukannya di Barus, di Pantai Barat Sumatera. Nommensen mencoba memahami budaya suku Melayu dan Batak dengan belajar dua bahasa tersebut selama empat bulan.¹¹ Dengan modal bahasa Melayu dan Batak yang dimilikinya dan pengalaman sakit-sakitan semasa kecilnya, Nommensen setiap hari mengunjungi dan memberi obat bagi orang-orang sakit. Pada setiap hari pasar, ia berupaya menyapa orang-orang yang datang dari pedalaman di luar Barus. Dia membeli tembakau yang dibagikan kepada pendatang untuk diteruskan kepada raja-raja mereka. Dengan begitu, Nommensen pun mudah melakukan pendekatan dan pertemuan dengan para raja di pedalaman sampai ke Silindung dan Toba-Samosir.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung keberhasilan pelayanan Nommensen adalah kemampuannya berbicara dalam bahasa Batak. Yang lain, mungkin pula ia belajar dan menjalani kehidupannya se seharidengan pola-pola, cara-cara, dan kebiasaan-kebiasaan yang sama dengan masyarakat setempat. Bukan tak mungkin ia suka makan *sangsang* (makanan khas Batak) pakai tangan, berpakaian *ulos* (kain tenun khas Batak) atau ikut menari *tortor* (tarian khas Batak) ketika berlangsung pesta atau upacara dalam peristiwa-peristiwa tertentu, dan lain sebagainya.

Jadi, jika kita pernah meragukan adat masyarakat tertentu dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip Alkitab, tak seharusnya kita tergesa-gesa menghakimi bahwa adat tersebut salah atau tidak Alkitabiah. Kalau pun setelah diuji memang demikian adanya, bukan berarti bahwa secara keseluruhan adat tersebut salah. Diperlukan hikmat dalam hal ini, untuk tidak serta-merta menolak pelayanan kepada suku-suku bangsa tertentu (dalam upacara pernikahan, misalnya) hanya karena beberapa unsur dalam adat mereka yang dianggap tidak Alkitabiah. Dalam kaitan itu saya mendukung pendapat Malcolm Brownlee tentang "Sikap Pembaharuan: Kristus memperbaharui Kebudayaan" dalam menyikapi dunia dan pelbagai kebudayaan yang ada di dalamnya.¹² Senada dengan itu Petrus Octavianus, seorang pelopor gerakan Pekabaran Injil di Indonesia, mengatakan: "Puncak kerinduan Allah untuk berkomunikasi dengan manusia diwujudkan dalam kehadiran-Nya sendiri di antara manusia. Ia hadir di dalam Yesus Kristus. Ia Yang Mahasuci sedia memasukkan diri-

Nya ke dalam kebudayaan manusia. Ia bahkan menjadi manusia sejati yang berkomunikasi dengan masyarakat lingkungan-Nya sesuai dengan bahasa dan kebudayaan mereka.”¹³

Kebudayaan Nasional Indonesia

Tak dapat disangkal bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang sangat majemuk, baik dalam hal suku, golongan, bahasa, adat-istiadat, agama, dan lainnya. Indonesia adalah bangsa yang multikultur.¹⁴ Pertanyaannya, adakah kebudayaan nasional Indonesia? Bagi saya ini sulit dijawab. Dulu, definisi konsep ini pernah dikemukakan dalam Tap MPR No. II Tahun 1998: “Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, karya dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berbudaya. Sementara tokoh pendidikan di masa lalu, Ki Hajar Dewantara, mengatakan bahwa kebudayaan nasional adalah “puncak-puncak dari kebudayaan daerah”. Yang membingungkan, apa maksudnya “puncak-puncak” itu?

Kedua definisi itu sekarang jelas tak memadai untuk dijadikan rujukan, bahkan dapat dikatakan absurd. Menurut saya apa yang disebut kebudayaan nasional itu haruslah merupakan hal-hal yang mempersatukan bangsa Indonesia. Apakah itu? Yang utama adalah Bahasa Indonesia. Adakah yang lainnya? Agama tidak, adat-istiadat tidak, jadi apa? Mungkin nilai-nilai (*values*). Kalau benar, nilai-nilai apa sajakah itu? Amerika Serikat, sebagai bangsa yang juga sangat majemuk, sudah memiliki belasan nilai yang disepakati sebagai “milik mereka”. Sebutlah, antara lain, kebebasan, kesetaraan, individualistik, independen, pragmatisme, patriotisme, optimisme, *self reliance*, penghargaan pada prestasi dan pencapaian, keanekaragaman, dan kerja keras (Luedtke, 1987). Bagaimana dengan Indonesia? Sudahkah kita menyepakati sejumlah nilai sebagai nilai-nilai kita bersama? Benarkah Indonesia hari ini masih seperti yang dikatakan Mochtar Lubis dalam salah satu pidatonya (2001), yakni: 1) munafik atau hipokrit, yang di antaranya menampilkan dan menyuburkan sikap ABS (asal bapak senang); 2) enggan dan segan bertanggung jawab atas perbuatannya; 3) bersikap dan berperilaku feodal; 3) percaya takhyul; 4) artistik, berbakat seni; 6) lemah watak atau karakternya?

Selain karakteristik tersebut, ada lagi yang menambahkan bahwa Orang Indonesia itu sulit dipercaya, malas belajar, kebiasaan menerabas, suap, koncoisme, ingin serba cepat jadi (instan), suka main *okol* (otot),

waton suloyo (asal berbeda), dan tidak disiplin, cepat puas, tak mampu berkompetisi secara bebas dan sehat, tidak kreatif dan inovatif, mencari prestisetanpa melalui prestasi, takut gagal sehingga kurang berani mencoba, kurang gemar membaca sehingga berwawasan sempit tapi banyak omong kosong (Astamoen, 2005).

Pembangunan Manusia

Membangun bangsa berarti membangun manusianya. Membangun manusia berarti mengembangkan kebudayaannya. Atas dasar itu maka kemajuan suatu bangsa pada dasarnya merefleksikan keunggulan budaya yang dimilikinya. Jadi, sejauh mana kemajuan ekonomi, politik, dan segala kemajuan yang diperoleh suatu bangsa niscaya tergantung pada nilai-nilai budaya yang dipreservasi oleh bangsa itu. Maka, jika sampai sekarang Indonesia masih begini-begini saja, nyaris stagnan, tak dapat dibantah bahwa nilai-nilai budaya kita memang belum berubah secara signifikan. Kita memang belum menjadi bangsa yang unggul. Kita belum seperti Orang Jepang yang punya nilai *gambaru*, yang membuat mereka cepat maju dan sanggup bertahan walau diterpa berbagai bencana.¹⁵

Ke depan, Indonesia harus menjadikan pembangunan kebudayaan sebagai agenda yang penting dan mendesak. Itu berarti pelbagai kebijakan pemerintah juga harus berorientasi pencerdasan dan pencerahan masyarakat, baik melalui sektor pendidikan maupun sektor lainnya. Pendidikan pun bukan hanya yang formal (sekolah/ perguruan tinggi), namun juga yang non-formal (luar sekolah/ perguruan tinggi). Sebab, melalui pendidikanlah nalar dan segenap potensi manusiawi dapat berkembang. Dan jika kedua hal itu berkembang maka manusia pun menjadi kreatif dan inovatif. Bukankah ini merupakan modal yang besar dan penting dalam pembangunan?

Di sisi lain, mungkin karena sangat banyak penduduknya dan beraneka-ragam kebudayaannya maka Indonesia terus-menerus berada di dalam proses pencarian akan identitasnya. Di era Orde Baru sepertinya Indonesia telah menjadi bangsa yang dewasa, dalam arti tak lagi seperti remaja yang masih sibuk mencari identitas. Namun di era sesudahnya kita disadarkan bahwa hal-hal yang seharusnya sudah "selesai" itu ternyata masih juga menjadi "pergumulan". Sebutlah, misalnya, dasar negara Pancasila, semboyan bineka tunggal ika, bentuk negara hukum, dan lainnya. Apalagi seiring waktu arus deras globalisasi dengan perkembangan dahsyat teknologi membawa banyak pengaruh asing masuk ke dalam negeri. Begitupun agenda-agenda demokratisasi yang bergulir begitu cepatnya. Sehingga, dalam beberapa hal Indonesia nampaknya seperti Orang Amerika yang gandrung teknologi modern, tapi dalam hal-hal lain justru seperti

Orang Arab yang suka menonjolkan simbol-simbol agama.

Apa boleh buat, inilah Indonesia yang sedang bertransisi. Inilah Indonesia yang terus-menerus berupaya membangun negara dan bangsanya demi mencapai kemajuan yang dicita-citakan. Kemajuan itu sendiri berarti perubahan, yang ditandai dengan semakin rasionalnya rakyat Indonesia.¹⁶ Untuk itu nasionalisme juga harus dimantapkan, dan ia harus berbasiskan demokrasi (dengan nilai-nilai utama kebebasan, keanekaragaman dan kesetaraan). Jadi, nasionalisme kita niscaya menyediakan ruang yang sama bagi partisipasi setiap warga masyarakat. Ia juga harus menghormati hak asasi manusia dan hukum. Dengan demikian maka jadilah nasionalisme Indonesia merupakan sebetulnya *modern-civic-nationalism*: nasionalisme kewargaan yang modern.¹⁷

Namun, nasionalisme tidak cukup hanya mencakup hal-hal yang abstrak itu saja. Khususnya dalam kehidupan bernegara, ia juga harus diisi dengan keadilan bagi semua. Keadilan itu sendiri harus mencakup dua hal: keadilan hukum dan keadilan sosial. Jadi, di arena-arena kehidupan publik, segala bentuk diskriminasi harus dihapuskan, kesejahteraan harus dimeratakan dan ditingkatkan. Jika tidak, jangan harapkan kita bisa berbangga menjadi warga negara Indonesia. Jika kebanggaan itu tak ada, maka sesungguhnya nasionalisme yang ada pun tak lebih dari sebetulnya nasionalisme semu yang setiap saat dapat lenyap.

Daftar Pustaka

- Kimlicka, Will, *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: LP3ES, 2003.
- Luedtke, Luther S., "The Search for American Character", dalam *Making America*, oleh Luther S. Luedtke (ed), Washington, D.C., United States Information Agency, 1987.
- Nomensen, Jonathan T., *Ompu i Dr. Ingwer Ludwig Nommensen*, (terj. Ny. EID Nababan-Tobing), Jakarta: Yakoma PGI, 2005.
- Sagala, Mangapul, "Apakah Benar Adat Batak Bertentangan dengan Injil?" Makalah Seminar Sehari "Adat Batak dan Injil", Yayasan Gema Kyriasa, Jakarta, 2004.
- Schreiner, Lothar, *Adat dan Injil*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- Suparlan, Parsudi, "Kata Pengantar" dalam Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Suparlan, Parsudi, "Kebudayaan dan Pembangunan", dalam Majalah *Dialog* No. 21, Jakarta, 1986.
- Suparlan, Parsudi, "Kemajemukan Amerika: dari Monokulturalisme ke Multikulturalisme", dalam *Jurnal Studi Amerika*, Vol. V, Agustus-Desember 1999.

Tomagola, Tamrin Amal, "Komunalisme Berbaju Nasionalisme", makalah disampaikan dalam Seminar Bhineka Tunggal Ika, Mengenang 100 Tahun Dr. Johannes Leimena, Jakarta, 24 September 2005.

Endnote

1. Tulisan ini melengkapi makalah pengantar diskusi yang sudah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Nasional: Aktualisasi Kepemimpinan Kristen dalam Perubahan Kepemimpinan Nasional, diselenggarakan oleh Yayasan Bina Darma dan Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 7 November 2014.
2. Dalam bahasa Inggris disebut *culture*, berasal dari bahasa Latin, yakni *colere*, yang artinya upaya manusia mengolah sesuatu dengan menggunakan akal-budinya. Dalam bahasa Indonesia dianggap berasal dari kata "*budhayah*" yang artinya "akal-budi".
3. Definisi tentang kebudayaan dalam tulisan ini utamanya saya rujuk dari tulisan Parsudi Suparlan, "Kebudayaan dan Pembangunan", dalam Majalah *Dialog* No. 21, Jakarta, 1986.
4. Dengan pengertian tersebut, berarti tidak ada kebudayaan di surga atau "kebudayaan surgawi". Tidak ada juga kebudayaan dalam kehidupan hewani atau kebudayaan hewani. Pendeknya, kebudayaan hanya milik manusia di dunia (kebudayaan manusiawi).
5. Bandingkan dengan pengertian serupa yang dikemukakan oleh para ahli kebudayaan (antropolog) terkemuka seperti Koentjaraningrat, Parsudi Suparlan, dan lain-lain.
6. Lihat "Kata Pengantar" oleh Parsudi Suparlan dalam Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
7. Tetapi, ia juga bersifat dinamis, sehingga tetap berpotensi untuk selalu berubah. Itulah paradoksnya kebudayaan: bersifat mantap, tapi juga bergerak menuju perubahan yang terus-menerus.
8. Lothar Schreiner, *Adat dan Injil*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
9. Dua misionaris asal Boston, Amerika Serikat, yaitu Samuel Munson dan Henry Lyman, tewas terbunuh di Lobu Pining, jalan antara Tarutung Sibolga, oleh Raja Panggalamei bersama rekan-rekannya pada tanggal 28 Juni 1834. Lihat Jonathan T. Nommensen, *Ompu i Dr. Ingwer Ludwig Nommensen*, (terj. Ny. EID Nababan-Tobing), Jakarta: Yakoma PGI, 2005.
10. Mangapul Sagala, "Apakah Benar Adat Batak Bertentangan dengan Injil?" Makalah Seminar Sehari "Adat Batak dan Injil", Yayasan Gema Kyriasa, Jakarta, 2004.
11. Jauh sebelumnya, Nommensen juga telah belajar banyak tentang kebudayaan Batak dari Van der Tuuk, ahli antropologi yang pernah dikirim oleh Kongsi Bibel Nederland ke Tanah Batak untuk mempelajari kebudayaan dan bahasa Batak.
12. Malcolm Brownlee, *Tugas Manusia dalam Dunia Milik Tuhan*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1997.
13. Petrus Octavianus, *Identitas Kebudayaan Asia dalam Terang Firman Allah*, Malang: Gandum Mas, 1985, hal 17.
14. Penjelasan konsep ini lihat Will Kimlicka, *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: LP3ES, 2003.
15. *Gambar* secara populer diterjemahkan sebagai berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan, bekerja hingga batas kemampuan terakhir, atau melakukan

sesuatu dengan segala daya dan upaya, bahkan yang terpahit sekalipun, untuk mencapai yang terbaik. Dikutip dari akusukamenulis.wordpress.com/2011/03/21/bercermin-pada-mental-gambaru-jepang.

16. Maka, tak bisa tidak, pendidikan harus selalu yang utama untuk “digarap” dalam proses pembangunan. Tak peduli apakah sifatnya formal atau non-formal. Yang penting adalah pencerahan dan pengembangan akal-budi. Proses perubahan itu sendiri bisa terjadi karena 1) keinginan sendiri; 2) dikondisikan; 3) dipengaruhi faktor-faktor luar atau asing.
17. Tamrin Amal Tomagola, “Komunalisme Berbaju Nasionalisme”, makalah disampaikan dalam Seminar Bhineka Tunggal Ika, Mengenang 100 Tahun Dr. Johannes Leimena, Jakarta, 24 September 2005.

Kepemimpinan Transformasional Antara Simbol, Jokowi dan Distorsi Politik

Boni Hargens
Ditulis kembali oleh
Richard G. Mayopu

Abstract

Politics as a symbolic system had been provided space for analysts to contribute their argument. Very diverse symbolic Systems has different interpretations. Therefore, this paper is concern to see the symbol in Christianity is actually more complex when associated with Christian leadership. Challenges and obstacles also come off in form of political communication in the form of distortion that is built on the basis of Christian leadership. "Jokowian" which is the introduction of a new model of leadership to the Indonesian context is also available as an answer to the question of "how leadership can be embedded in the soul of Christian leaders in Indonesia?". And that is the spirit of transformational leadership.

Keywords: *Symbol, Distortion, and Transformational leadership.*

Pendahuluan

Ketika berbicara mengenai kekristenan, maka yang ada di dalam benak setiap manusia adalah simbol-simbol kekristenan itu sendiri. Sebagaimana yang sering dilihat oleh manusia (yang nampak kasa mata), kekristenan selalu disimbolkan dengan salib, gereja, hingga segala macam atribut seperti kalung salib, tulisan-tulisan yang bertuliskan "doa bapa kami"¹ yang bisa ditemui pada kaos, gantngan kunci dan segala pernak-pernik bernuansa kristen. Namun yang perlu disadari adalah bahwa kekristenan merupakan sebuah nilai yang tidak bisa dilihat dari kasa mata manusia saja namun lebih jauh dari pada itu kekristenan merupakan nilai falsafah yang sangat kuat yang harusnya tertanam dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia. Nilai yang dimaksud sendiri adalah nilai kasih dalam keseharian maupun dalam kehidupan iman itu sendiri.

Kekristenan sendiri sejatinya sudah menghidupi seluruh bidang kehidupan namun jika dikaitkan dengan kepemimpinan kristen di

Indonesia maka akan ditemui beberapa tantangan yang cukup mendasar dalam kepemimpinan tersebut. Terutama jika melihat konteks Indonesia dengan kompleksitas dinamika perpolitikan nasional yang sangat dinamis ini. Di dalam beberapa literatur ditemui berbagai definisi kepemimpinan kristen yang ideal harus dimiliki oleh seorang kristen

Kepemimpinan Transformasional (Yesus Vs Jokowi-an)

Kepemimpinan transformasional secara ringkas dapat didefinisikan sebagai satu cara untuk memengaruhi orang lain sedemikian sehingga mereka mau dan rela memunculkan kebajikan dan kapabilitas terbaiknya di dalam proses penciptaan nilai (Hartanto 2009 : 512). Nilai yang dimaksud adalah nilai baik secara individual yang kemudian ditransfer ke dalam nilai universal, maupun nilai individu yang ditransfer ke dalam nilai-nilai kelompok. Selanjutnya Hartanto menambahkan menambahkan pemimpin transformasional biasanya bersikap proaktif dalam berbagai hal, mereka bukan hanya ingin memaksimalkan kerja, melainkan juga mengembangkan anggota. Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Robert J. Starratt dalam bukunya menghadirkan pemimpin visioner, dimana kepemimpinan transformasional melibatkan usaha mengangkat pandangan orang melampaui kepentingan diri menuju usaha bersama demi tujuan bersama. Pemimpin transformasional membuat orang bertindak atas nama kepentingan kolektif kelompok atau komunitas mereka. Sehingga kepentingan transformasional memperhatikan nilai-nilai kolektif umum seperti kebebasan, kesamaan, komunitas, keadilan dan persaudaraan (Sttaratt 2007:140).

Kepemimpinan transformasional tidak hanya berkembang dalam teori-teori organisasi dan manajemen akan tetapi juga bisa temukan dalam pribadi Yesus Kristus, yang merupakan seorang mesias dan Pemimpin yang dan memiliki kepemimpinan yang khas. Robert Greenleaf (1977) mengatakan bahwa faktor kunci dalam menghadirkan kepemimpinan transformasional yang efektif adalah “Kepemimpinan Pelayan” dan yesus telah memperlihatkannya (D'Souza, 2009:3). Dalam berbagai cerita Alkitab Kepemimpinan Pelayan oleh Yesus Kristus diimplementasikan oleh para pengikut-Nya (Rasul-rasul Yesus) dalam karya pelayanan mereka, dan dengan segala tantangan mereka mentransfromasikan perubahan-perubahan dalam dunia. Ketika berbicara kepemimpinan kristen, maka kita tidak akan bicara soal simbol di dalam kekristenan tersebut. Simbol yang dimaksud adalah Salib, Gereja, hingga segala yang sudah diturunkan ke dalam atribut-atribut kerohanian

berupa lagu, Tari-tarian, hingga busana khas kristen. Kekristenan jauh lebih dari pada itu. Semangat Injili yang ditunjukkan oleh yesus telah memberikan sebuah semangat baru yang lebih dikenal dengan istilah harapan terang ditengah-tengah kegelapan atau bisa dikatakan kebingungan politik kepemimpinan untuk melahirkan tokoh pemimpin berlandaskan nilai-nilai kekristenan yang dipahami dan disepakati bersama.

Karena hal ini merupakan upaya untuk mengkerdilkan kekristenan itu sendiri dan terutama melecehkan yesus sebagai kristus yang dimana Dia merupakan pemimpin yang baik. Bahkan gereja sebagai simbol, bisa menjadi penyebab dari kekisruhan politik kepemimpinan yang ada.

Kekristenan adalah sebuah panggilan yang hanya dilandaskan pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan untuk kepentingan banyak orang yang kemudian dikonversi ke dalam nilai-nilai universal yaitu keberpihakan kepada kaum tertindas dan inilah nilai politik kristiani.

Selama kurang lebih 17 tahun setelah reformasi, Indonesia belum mendapatkan figur pemimpin yang benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat luas karena beberapa alasan salah satunya adalah tersandera oleh kepentingan elit maupun partai yang mengusung sang pemimpin. Sehingga terjadi turbulensi politik atau hantaman keras politik terhadap pemimpin itu sendiri oleh para elit maupun partai pengusung.

Jika mengacu pada pemikiran Laclau-Mouffe, Masyarakat Indonesia yang multikultural tentu saja memerlukan perwakilan politik yang plural. Demokrasi yang ideal mesti dicirikan oleh artikulasi kepentingan yang jamak (Hargens, 2006 : 107). Sehingga semangat keadilan dan kebenaran juga bisa dituangkan dalam demokrasi yang mengakomodir kejamakan menuju pemahaman pluralisme yang baik.

Kepemimpinan transformasional sebagai proses dimana pemimpin dan pengikutnya bersama-sama saling meningkatkan dan mengembangkan moralitas dan motivasinya. Dapat dikatakan pula bahwa kepemimpinan transformasional sebagai kepemimpinan yang mampu mendatangkan perubahan di dalam diri setiap individu yang terlibat atau bagi seluruh organisasi untuk mencapai performa yang semakin tinggi. Kepemimpinan transformasional pada hakekatnya menekankan peran pemimpin yang memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggung-jawab mereka lebih dari yang mereka harapkan (Runtuwene 2011 : 1)

Jokowi merupakan jawaban dari segala doa yang dipanjatkan oleh

umat kristen. Jokowi menembus berbagai macam teori kepemimpinan yang ada. Teori yang dipakai adalah teori yang sudah digunakan oleh yesus kristus

Demokrasi Jokowi²

Komunikasi politik yang baik menjamin harmoni antara pemerintah dan parlemen. Dalam presidensialisme Jokowi, tak ada upaya saling mendominasi antara pemerintah dan parlemen.

Seusai diumumkan Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi JK pada 26 oktober 2014, bergulir banyak kritik terhadap kabinet tersebut. Ada yang bilang, kabinet tak memperhitungkan proporsi kedaerahan. Yang lain bilang, kabinet bentuk kompromi politik seperti tuduhan Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono. Benarkah demikian?

Ketika awal berkuasa di tahun 1829, tak sedikit yang resah dengan Andrew Jackson (1767-1845), presiden ke-7 dalam sejarah Amerika Serikat. Penekanannya pada prinsip kesetaraan dianggap kebablasan oleh kaum industrialis. Pasar perdagangan budak yang begitu ramai di selatan saat itu merupakan kebutuhan yang krusial bagi industri-industri di utara yang membutuhkan tenaga kerja murah. Prinsip kesetaraan Jacksonian ditangkap sebagai semangat baru oleh para aktivis antiperbudakan di selatan meski bukan itu tujuan Jackson.

Jackson menolak monopoli elite. Politik ialah untuk semua. Meski “semua” saat itu mengacu pada yang kulit putih. Setidaknya, Jackson membagi peluang bagi banyak orang di tengah konteks politik yang dikuasai kelas terbatas yang disebut “kelas politik” oleh Gaetano Mosca (1896).

Politik Jacksonian ialah arus kuat yang muncul setelah politik Jeffersonian mewarnai Amerika sebelumnya (1800-1824). Jefferson juga menolak aristokrasi dan menjamin hak individu. Namun, penekanan kaum Jeffersonian ialah prinsip republikanisme bahwa tiap warga wajib membantu negara termasuk dalam mencegah korupsi.

Thomas Jefferson memulai prinsip itu selama menjadi presiden (1801-1809). Ia meyakini, negara kuat bila tiap warga ikut membantu. Negara dan rakyat tak terpisahkan. Sebagaimana tesis kaum integralistik pada umumnya, Jacksonian melihatnya lain. Negara kuat kalau (1) ada presidensialisme yang kuat dan (2) partisipasi publik dalam pemerintahan.

Bagaimana dengan Jokowi? revolusi mental ialah keyakinan sekaligus weltanschauung (cara pandang) bahwa perubahan harus

dimulai dari pikiran, hati, dan keseluruhan kesadaran. Rakyat bukan cuma partikel atom dalam molekul bernama 'negara' yang dituntut bertanggung jawab padanya seperti logika Jeffersonian, melainkan juga subyek otonom yang bertanggung jawab atas ontologinya. Maka, revolusi mental bukan sebuah gerakan "mengambil alih tugas negara" atau gerakan "menuju negara pasif" atau ketika semua orang mengalami revolusi mental, lalu negara akan diam pasif.

Revolusi mental bermakna negara dan warga sama-sama proaktif memperjuangkan perubahan. Negara harus aktif memenuhi kewajibannya terhadap warga negara dan sebaliknya, warga dituntut proaktif memenuhi kewajiban kewargaan dan mengembangkan dirinya. Karena dengan begitu, tiap orang memberi bentuk dan makna pada keberadaan ontologis mereka sebagai manusia dan sebagai warga.

Barangkali dengan memahami pembentukan kabinet, kita bisa mengerti maksud revolusi mental dalam skala tertentu. Orang mempersoalkan dua hal, yaitu pelibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta proporsi kedaerahan atau kesukuan dalam kabinet.

Melibatkan PPATK dan KPK ialah manifestasi keyakinan Jokowi tentang pentingnya deliberasi publik dalam mengambil keputusan karena dua lembaga itu representasi dari kehendak publik. Dalam hal itu, Jokowi seorang Jacksonian atau Habermasian dalam konteks kontemporer.

Apakah hal itu tidak mencederai hak prerogatif? Hak prerogatif ialah hak yang melekat pada diri presiden, tak bisa dikurangi atau dibatalkan oleh (si-) apa pun. Keputusan meminta pertimbangan PPATK dan KPK ialah keputusan bebas Jokowi. Itulah bentuk operasional dari hak prerogatif.

Selain itu, partisipasi publik ialah mekanisme pertahanan yang cerdas dari Jokowi menghadapi "siluman-siluman" politik yang hendak mengebiri hak prerogatif untuk kepentingan terbatas yang mencederai demokrasi. Keberanian Jokowi melibatkan PPATK dan KPK mesti di lihat sebagai halaman pertama dari keseluruhan buku revolusi mental pemerintahannya.

Turbulensi politik

Kritik lain muncul pada soal proporsi primordial. Pesan singkat beredar yang isinya seolah-olah suku atau daerah tertentu protes tak ada wakilnya dalam kabinet. Apa yang terjadi merupakan sebuah pelajaran revolusi mental. Jokowi mengajarkan cara berpikir transendental bahwa

yang utama bukan simbol parsial melainkan kekitaan yang melekat dalam tiap kita sebagai satu entitas bernama 'bangsa'. Tak ada Jawa, Batak, Flores, Sunda, atau pun Papua. Tak ada Islam, Hindu, Katolik, Budha, atau pun Protestan. Tak ada timur atau pun barat. Yang ada ialah kita. Kita sebagai Indonesia. Penentuan kabinet tak boleh didasarkan pada determinasi kesukuan, agama, atau kedaerahan. Kompetensi dan integritas merupakan determinasi utama.

Hal tersebut merupakan turbulensi politik parlemen saat ini. Mereka bilang, Jokowi tidak memperlihatkan reaksi tertentu yang cukup serius. Di awal dulu, para spekulasi beranggapan Jokowi bakal memperjuangkan komposisi mayoritas di parlemen supaya pemerintahan mulus. Mereka lupa, komposisi parlemen bukan ancaman bagi Jokowi yang dimenangkan oleh kehendak rakyat.

Hubungan kritis pemerintah dan parlemen ialah keharusan dalam konteks check and balance atau saling kontrol. Tidak ada presidensialisme raksasa yang begitu kuat seperti model Jacksonian begitu juga heavy legislative. Komunikasi politik yang baik menjamin harmoni antara pemerintah dan parlemen. Dalam presidensialisme Jokowi, tak ada upaya saling mendominasi antara pemerintah dan parlemen.

Prinsip-prinsip inilah yang disebut demokrasi Jokowi. Demokrasi yang didasarkan pada kehendak rakyat, dikerjakan dengan semangat kebangsaan, dan didukung mekanisme presidensialisme yang membutuhkan legislatif kritis dalam rangka mewujudkan perubahan menyeluruh yang berbasis pada semangat revolusi mental.

Distorsi dalam Komunikasi Politik (Sebuah Prediksi untuk Mengawal Kepemimpinan Kristen)

Distorsi atau gangguan dalam proses politik maupun komunikasi politik bisa menjadi batu sandungan bagi sebuah subjek yang dipimpin oleh kepemimpinan kristen. Mengapa tidak, setiap pertimbangan politik yang akan dijalankan, pasti akan menemui halangan dan rintangan yang seharusnya menjadi batu loncatan untuk beralih ke tantangan berikutnya. Berikut merupakan beberapa gangguan dalam proses komunikasi politik.³

1. Distorsi bahasa sebagai "topeng"; ada euphemism (penghalusan kata); bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkapkan Ben Anderson (1966), "bahasa topeng". Bahasa topeng ini juga berfungsi sebagai "kamufase politik" yang nampaknya sering disukai oleh para politisi maupun pemimpin-pemimpin di era modern ini.

Namun pertanyaan reflektif nya adalah apakah hal ini diijinkan dalam kepemimpinan kristen?

2. Distorsi bahasa sebagai “proyek lupa”; lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang.” Tentunya masyarakat Indonesia masih segar dalam ingatannya ketika seorang koruptor dicecar berbagai pertanyaan oleh jaksa dalam sebuah kasus persidangan berkaitan dengan tindakan pidana korupsi yang telah dilakukan maka jawaban yang paling sering diberikan adalah “maaf yang mulia, saya tidak ingat” atau “ maaf yang mulia saya tidak yakin. Hal ini yang kemudian jika diinternalisasi dalam kehidupan kepemimpinan akan mempengaruhi semangat kepemimpinan kristen tersebut.
3. Distorsi bahasa sebagai “representasi”; terjadi bila kita melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Sudah menjadi “penyakit” argumentasi bangsa ini adalah ketika setiap orang berpendapat selalu men-generalisasi satu persoalan tertentu. Hal ini tentunya bisa memberikan dampak yang kurang baik dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan manusia yang selalu kontekstual menjadikan asing-masing bagian dalam kehidupan manusia menjadi sesuatu yang unik dan khas-an tersendiri.
4. Distorsi bahasa sebagai “ideologi”. Ada dua perspektif yang cenderung menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang atau bisa juga sebagai monopoli politik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat. Namun jika tujuan tertinggi yang dimaksud adalah bagi kemaslahatan banyak orang, maka perspektif ini juga bisa dibenarkan dan bisa digunakan, walaupun terkadang kepentingan masyarakat digunakan sebagai “pintu masuk” menuju kepentingan golongan dan elite tertentu.

Distorsi yang menjadi “hantu” dalam proses komunikasi politik ini kemudian harus diatur dan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar bisa dioptimalkan dalam mengembangkan kepemimpinan transformasional. Sebagai hantu, tentunya juga harus dipersiapkan kiat-kiat untuk mengakal terjadinya distorsi yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan penangkal yang

ampuh adalah dengan tetap menjalankan nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kepentingan semua golongan terutama dalam masyarakat Indonesia yang plural.

Kesimpulan

Terdapat beberapa kesamaan dalam pola kepemimpinan kristen yang diharapkan oleh masyarakat kristiani yang juga dicontoh dari kepemimpinan yesus kristus dan jokowian. Sebagai pelayan, yesus selalu mengutamakan umat sebagai dasar pengambilan kebijakan maupun tindakan baik secara individu maupun secara kolektif. Dan jokowi, dengan “Blusukan” sebagai senjata ampuh untuk melayani masyarakat, kemudian menempatkan dia dalam hal ini bisa sebagai representatif kepemimpinan kristen yang dibutuhkan oleh umat manusia pada saat ini.

“Blusukan” selalu identik dengan jokowi, walaupun sebenarnya jika dilihat dari sudut pandang pemimpin nasional, maka kita bisa melihat tidak sedikit tokoh yang sudah melakukan hal ini. Pada jaman Orde Baru sekalipun, diktator seperti H.M. Soeharto pun sudah melakukannya. Bahkan menjadi agenda rutin tahunan presiden ke 2 Republik Indonesia tersebut untuk mengunjungi para petani didaerah. Hal ini tentunya memberikan suntikan moral bagi masyarakat untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini.

Namun sedikit berbeda dengan pendahulunya, Jokowi tidak saja menjadikan agenda tahunan namun menjadikan agenda bulanan untuk mengunjungi masyarakat Indonesia. Bahkan bukan saja pada saat kampanye pemilihan Presiden, jokowi melakukan safari politik ke berbagai kalangan masyarakat, namun juga pada saat menjabat sebagai presiden, ia masih rutin untuk turun langsung dan mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat.

Dengan melihat fenomena ini maka ada optimisme baru dengan hadirnya kepemimpinan transformatif yang diusung oleh yesus kristus dan diinternalisasi oleh tokoh yang mungkin tidak bersinggungan langsung secara emosional namun menjalankan gaya kepemimpinan untuk mau menjadi pelayan demi menyampaikan kebenaran dan menyebarkan keadilan tanpa memberikan distorsi komunikasi politik terhadap masyarakat. Tipe pemimpin seperti inilah yang setidaknya dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada saat ini guna terciptanya revolusi mental yang sejati.